

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

BRMP Sulawesi Tenggara
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Jln.Prof.Muh.Yamin No.89 Puuwatu

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BRMP Sulawesi Tenggara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BRMP Sulawesi Tenggara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BRMP Sulawesi Tenggara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kota Kendari, 31 Desember 2025
Kepala Balai,

Dr. Budi Sasmita Putra, SE., MM
NIP. 198205202009101001



Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Tanah Belum Diregister

C.2.3. Peralatan dan Mesin

C.2.4. Gedung dan Bangunan

C.2.5. Gedung dan Bangunan Belum Diregister

C.2.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

C.2.8. Aset Tetap Lainnya

C.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 PUUWATU, KENDARI - KODE POS 93114
TELEPON / FAXIMILE: (0401) 3123180

WEBSITE : <http://sultra.bmp.pertanian.go.id> , e-mail : bmp.sultra@pertanian.go.id
.go.id , e-mail : bsip.sultra@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BRMP Sulawesi Tenggara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kota Kendari, 31 Desember 2025

Kepala Balai,


Dr. Budi Dharma Putra, SE., MM
NIP. 198205202009101001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BRMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada SEMESTER II TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 212,878,956 atau mencapai 327.51% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 65,000,000.

Realisasi Belanja Negara pada SEMESTER II TA 2025 adalah sebesar Rp 15,466,039,505 atau mencapai 95.71% dari alokasi anggaran sebesar Rp 16,158,440,000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 132,776,929,698 yang terdiri dari: Aset Lancar (neto) sebesar Rp 79,295,000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 132,647,514,698; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 50,120,000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 132,776,929,698.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 48,958,648 sedangkan jumlah beban adalah sebesar 15,960,361,698 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-15,911,403,050. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus/Defisit senilai Rp 61,555,308,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp- 15,849,847,742.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 133,280,766,891 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp- 15,849,847,742 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 92,850,000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 15,253,160,54 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 132,776,929,698.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BRMP Sulawesi Tenggara

BRMP Sulawesi Tenggara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri yang modern serta Berkelanjutan selanjutnya Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BRMP Sulawesi Tenggara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua yang didapatkan dari laporan SAKTI pada Modul GL dan Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang diperoleh dari Laporan SAKTI Modul Aset Tetap. SAKTI Modul GL dan Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SAKTI Modul Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BRMP Sulawesi Tenggara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BRMP

Sulawesi Tenggara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BRMP Sulawesi Tenggara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BRMP Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer		04
Franchise		05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim		20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan		25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram		50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I		70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. **Kewajiban Jangka Pendek**
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. **Kewajiban Jangka Panjang**
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 212,878,956 atau mencapai 327.51% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar 65,000,000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	65,000,000	212,878,956	327.51
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	65,000,000	57,974,400	89.19

Realisasi Pendapatan TA 2025 adalah Mengalami Kenaikan. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BRMP Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian		Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	.%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		212,878,956	103,504,246	
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi		0,00	0,00	0,00
Jumlah		212,878,956	103,504,246	

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp 15,466,039,505 atau 95.71% dari anggaran belanja sebesar Rp 16,158,440,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2025

Uraian		2025		
Akun Belanja		Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		3,937,171,000	3,927,006,098	99.74
Belanja Barang		11,441,411,000	10,765,699,975	94.09
Belanja Modal		779,858,000	773,333,432	99.16
Total Belanja Kotor		16,158,440,000	15,466,039,505	95.71
Pengembalian Belanja		-	-	-
Total Belanja		16,158,440,000	15,466,039,505	95.71

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami Kenaikan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Bertambahnya SDM dan kenaikan pangkat/golongan untuk beberapa pegawai.
2. Bertambahnya jumlah kegiatan demonstrasi, pendampingan, dan diseminasi inovasi pertanian.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung modernisasi pertanian yang tidak ada di tahun sebelumnya.

4. Optimalisasi pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pertanian seperti Swasembada Pangan dan ICARE.

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	.%
Belanja Pegawai	3,927,006,098	3,624,615,370	
Belanja Barang	10,765,699,975	7,993,798,103	
Belanja Modal	773,333,432	-	
Total Belanja	15,466,039,505	11,618,413,473	

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	-	-	-	664,334,949
Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	-	-	-	397,713,479
Program Dukungan Manajemen	8,667,954,000	8,236,032,766	95.04	7,636,183,093
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	7,457,749,000	7,230,006,739	97.22	2,920,181,952
Jumlah	16,125,703,000	15,466,039,505	95.85	11,618,413,473

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 3,847,626,032 apabila dibandingkan TA 2024. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Peningkatan alokasi anggaran pada beberapa program/kegiatan prioritas.
2. Bertambahnya volume kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Adanya penyesuaian kebijakan dan kebutuhan operasional satker.

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3,927,006,098 dan Rp 3,624,615,370. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami Kenaikan dari TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Nalk (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,207,690,118	3,077,669,366	
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	590,919,980	207,874,004	
Belanja Lembur	128,396,000	339,072,000	
Jumlah Belanja Kotor	3,927,561,248	3,639,231,115	
Pengembalian Belanja Pegawai	555,150	14,615,745	
Jumlah Belanja	3,927,006,098	3,624,615,370	

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan akun.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 302,390,728 apabila dibandingkan TA 2024. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Bertambahnya jumlah PNS dan PPPK, yang berdampak langsung pada peningkatan belanja gaji dan tunjangan.
2. Adanya kenaikan pangkat/golongan dan penyesuaian hak kepegawaian, sehingga meningkatkan komponen belanja pegawai.

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 10,765,699,975 dan Rp 7,993,798,103.

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	11,441,411,000	10,765,699,975	94.09	7,993,798,103
Belanja Barang Operasional	1,946,261,000	1,945,961,328	99.98	1,834,544,720
Belanja Barang Non Operasional	1,808,089,000	1,787,709,880	98.87	2,030,009,000
Belanja Barang Persediaan	402,053,000	385,683,000	95.93	261,285,000
Belanja Jasa	534,550,000	533,924,515	99.88	498,747,834
Belanja Pemeliharaan	845,777,000	845,766,130	100	941,959,992

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	2,089,932,000	1,665,613,022	79.7	2,427,251,557
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	3,814,749,000	3,601,042,100	94.4	-
Jumlah	11,441,411,000	10,765,699,975	94.09	7,993,798,103

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami peningkatan dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Peningkatan kegiatan bantuan/sarana pertanian yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok tani dalam rangka penerapan modernisasi pertanian.
2. Bertambahnya volume dan cakupan penerima manfaat program.

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 773,333,432,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2025 mengalami Penurunan sebesar 773,333,432% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pengadaan kendaraan dinas sebagai sarana pendukung operasional dan pelaksanaan kegiatan penerapan modernisasi pertanian.
2. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satker.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	773,333,432	0,00	773,333.432
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	
Jumlah Belanja Kotor	773,333,432	0,00	773,333.432
Pengembalian Belanja Modal	773,333,432	0,00	
Jumlah Belanja	773,333,432	0,00	773,333.432

B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami Penambahan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak ada Belanja Modal tanah

Perbandingan Belanja Modal Tanah
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja		Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	
Jumlah Belanja Kotor		0,00	0,00	
Pengembalian Belanja		0,00	0,00	
Jumlah Belanja		0,00	0,00	

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp Rp 773,333,432,00, dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami Penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya belanja modal alat dan mesin berupa :
 - Kendaraan Dinas
 - Peralatan Operasional Perkantoran (TV, Starlink, dll)

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja		Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		773,333,432,00	0,00	773,333.432
Jumlah Belanja Kotor		773,333,432,00	0,00	773,333.432
Pengembalian Belanja		0,00	0,00	
Jumlah Belanja		773,333,432,00	0,00	773,333.432

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak ada belanja modal gedung dan bangunan

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja		Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	
Jumlah Belanja Kotor		0,00	0,00	
Pengembalian Belanja		0,00	0,00	
Jumlah Belanja		0,00	0,00	

B.5.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak ada belanja modal JIJ.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja		Realisasi 30 Desember 2025	Realisasi 30 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	
Jumlah Belanja Kotor		0,00	0,00	
Pengembalian Belanja		0,00	0,00	
Jumlah Belanja		0,00	0,00	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025
Saldo BP Kas (tunai dan Bank)	0,00
Saldo BP Uang Muka (Voucher)	,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp79,295,000,00 dan Rp0,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	42.530.000,00	0,00
Barang Persediaan Lainnya	36.765.000,00	0,00
Jumlah	79.295.000,00	0,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 111,874,290,000,00 dan Rp111,874,290,000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	111,874,290,000,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	0,00
Saldo per 30 Desember 2025	111.874.290.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

1. Tidak ada Mutasi tambah tanah melalui pengembangan KDP.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 12,020,310,577,00 dan Rp 11,246,977,145,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	11,246,977,145,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	773,333,432,00
Saldo per 31 Desember 2025	12,020,310,577,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pengadaan peralatan dan mesin melalui belanja modal.

C.2.4. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 23,591,972,900,00 dan Rp 23,591,972,900,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	23,591,972,900,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	23.591.972.900,00

C.2.5. GEDUNG DAN BANGUNAN BELUM DIREGISTER

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Akun Gedung dan Bangunan Belum Diregister tersaji dalam Neraca SAIBA dikarenakan aplikasi SIMAK-BMN belum dapat mengirimkan data ke SAIBA untuk melakukan jurnal koreksi terhadap akun tersebut. Rincian Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan Belum Diregister
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.2.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,281,746,700,00 dan Rp 2,281,746,700,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2,281,746,700,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	2.281.746.700,00

C.2.7. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BELUM DIREGISTER

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister tersaji dalam Neraca SAIBA dikarenakan aplikasi SIMAK-BMN belum dapat mengirimkan data ke SAIBA untuk melakukan jurnal koreksi terhadap akun tersebut. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
--------	------------------	------------------

C.2.8. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp5.000.000,00.

Saldo Awal 2025		5.000.000
Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		0,00
Saldo per 31 Desember 2025		5.000.000

C.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.316.454.414,00 dan Rp1.316.454.414,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-43,687,000,00 dan Rp-15,822,792,151,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan
1	Tanah	111,874,290,000.	
2	Peralatan dan Mesin	11,246,977,145.	
3	Gedung dan Bangunan	23,591,972,900.	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,281,746,700.	
5	Aset Tetap Lainnya	5,000,000.	

6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,316,454,414.	
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(13,442,259,893)	
	JUMLAH ASET TETAP	132,647,514,698	

C.4.1. ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp59.665.000,00 dan Rp59.665.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud	59,665,000,00
Aset Lain-lain	34,142,000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(43,687,000)
Jumlah	50,120,000,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.142.000,00 dan Rp34.142.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BRMP Sulawesi Tenggara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp-18,485,946,893,00 dan Rp-1,268,099,675,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
----	--------------	-----------------	-----------------	------------

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	59.665.000,00	-8.865.000,00	50.800.000,00
2.	Aset Lain-lain	34.142.000,00	-43,687,000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		93.807.000,00	-52.552.000,00	50.120.000,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0. 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per Semester II 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
3	Uang Muka Dari KPPN	0,00	0,00	0,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per SEMESTER II 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per SEMESTER II 2025. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per SEMESTER II 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.2. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per SEMESTER II 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per SEMESTER II 2025.

C. 6. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 132,776,929.698 dan Rp 133,280,766,891. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 48,958,648,00 dan Rp 30,154,000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024

Uraian	Realisasi 30 Desember 2025	Realisasi 30 Desember 2024
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	48,958,648	30,154,000
Jumlah	48,958,648	30,154,000

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3,927,006,098 dan Rp 3,552,108,288. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pegawai	3,927,006,098	3,552,108,288	10.554
Jumlah	3,927,006,098	3,552,108,288	10.554

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 421,263,000,00 dan Rp 261,285,000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024

Uraian		Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban persediaan		421,263,000	261,285,000	61.227
Jumlah		421,263,000	261,285,000	61.227

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4,267,595,723 dan Rp 4,363,301,554. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024

Uraian		Realisasi 30 Desember 2025	Realisasi 30 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Barang dan Jasa		4,267,595,723	4,363,301,554	(2.193)
Jumlah		4,267,595,723	4,363,301,554	(2.193)

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 845,766,130 dan Rp 941,959,992. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian		Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 30 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan		845,766,130	941,959,992	(10.212)
Jumlah		845,766,130	941,959,992	(10.212)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,665,613,022,00 dan Rp 2,427,251,557,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 30 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan	1,665,613,022	2,427,251,557	(31.379)
Jumlah	1,665,613,022	2,427,251,557	(31.379)

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3,565,462,100,00 dan Rp 0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 30 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3,565,462,100	0,00	
Jumlah	3,565,462,100	0,00	

Pada 31 Desember 2025 terdapat Bantuan yang diserahkan ke Masyarakat dari kegiatan Icare berupa :

1. Motor Roda 3
2. Traktor Roda 4
3. Pupuk
4. Benih

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 1,268,099,675 dan Rp 1,351,528,067. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Amortisasi	1,268,099,675	1,351,528,067	(6.173)
Jumlah	1,268,099,675	1,351,528,067	(6.173)

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional	(15,911,403,050)	(12,867,724,508)	23.654
Jumlah	(15,911,403,050)	(12,867,724,508)	23.654

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 133,280,766,891 dan Rp 134,471,421,926.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp -15,849,847,742 dan Rp -12,705,564,262. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 92,850,000,00 dan Rp0,00

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Aset persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp79,295,000,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai persediaan yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 15,253,160,54 dan Rp 11,514,909,227. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1. Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan dan Penurunan Ekuitas Pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 saldo dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp -503,837,193 dan Rp -1,190,655,035.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 132,776,929,698 dan Rp 133,280,766,891.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Tidak ada peristiwa penting

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Adanya Penyampaian Pemutakhiran Akun Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Dinas/Negara semula menggunakan kodefikasi segmen akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) menjadi kodefikasi segmen akun 425151 (Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi) pada tanggal 11 Maret 2025 dengan Nomor Surat: S-7/PB/PB.6/2025,

sehingga penyetoran bulan Januari dan Februari masih menggunakan akun 425131. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2025 baru dilakukan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dengan merubah akun 425131 menjadi akun 425151 sejumlah Rp 3.384.800.